

## FASILITAS UMUM

# Fauzi Berjanji Akan Terus Tagih Ratusan Pengembang

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus menagih fasilitas umum dan fasilitas sosial yang belum diserahkan pengembang kepada pemerintah.

"Pemerintah akan tetap menagih kepada pengembang," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo dalam penjelasan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta tentang empat rancangan peraturan daerah, Jumat (16/9).

## Baru 10,5 persen

Data di Biro Perlengkapan DKI Jakarta hingga 2008 menyebutkan, dari 2.237 pengembang, hanya 237 pengembang yang menyerahkan kewajiban berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos) atau 10,5 persen.

Fasum-fasos itu akan ditagih oleh Pemprov DKI Jakarta dalam wujud senyatanya, bukan dalam bentuk uang.

"Penggantian dalam bentuk uang itu hanya akan dilakukan saat terakhir jika sudah tidak bisa lagi diberikan dalam bentuk fasum-fasos. Ini alternatif terakhir," ujar Fauzi.

Penggantian dalam bentuk uang ini pun tidak akan mudah dijalankan pengembang. Untuk bisa mengganti fasum dan fasos dalam bentuk uang itu, pengembang harus mendapat persetujuan dari gubernur.

## Inventarisasi Rp 17,4 triliun

Menurut Fauzi, sejak tahun 2009, Pemprov DKI Jakarta telah membentuk tim terpadu bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Per-

wakilan DKI Jakarta. Tugas tim ini melakukan sensus fasum dan fasos.

Hasil yang diperoleh, inventarisasi fasum dan fasos yang diterima dari tahun 1971 sampai tahun 2008 adalah Rp 8,76 triliun.

Setelah dilakukan penilaian kembali tahun 2009 dan 2010, diperoleh nilai fasum dan fasos sampai dengan 31 Desember 2010, sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2010, sebesar Rp 17,4 triliun sehingga terjadi peningkatan Rp 8,64 triliun.

Fauzi mengatakan, pada tahun 2011 juga dibentuk tim khusus untuk melakukan penagihan sensus lanjutan yang didampingi langsung oleh BPK Perwakilan DKI Jakarta.

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 5,6 triliun belum dilakukan

sensus. Jumlah ini yang membuat BPK menilai Pemprov DKI Jakarta dengan nilai wajar dengan pengecualian.

"Jika dilihat materialitas permasalahan yang dikemukakan oleh BPK dibandingkan dengan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang secara keseluruhan sebesar Rp 407,09 triliun, maka fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dipermasalahkan BPK tersebut hanya 4,27 persen (Rp 17,4 triliun) dari total aset," ujarnya.

## Organisasi berbelit

Sementara itu, Fraksi Demokrat mencatat, dari 2.545 surat izin penunjukan penggunaan tanah (SIPPT) yang dikeluarkan sejak tahun 1971 sampai 2004, yang efektif melaksanakan sebanyak 2.236 SIPPT. Dari jumlah

tersebut, baru 8 persen yang menyelesaikan kewajibannya, termasuk menyerahkan fasum dan fasos.

Fraksi Demokrat melihat, persoalan fasum-fasos ini timbul karena tidak ada jadwal pelaksanaan kegiatan dan jadwal penyerahan fasum-fasos kepada Pemprov DKI Jakarta.

Secara organisasional, Pemprov DKI Jakarta juga belum siap menerima pengalihan dan pemanfaatan fasum-fasos. Organisasinya juga amat rumit dan terlalu banyak satuan kerja yang terkait dalam penyelesaian fasum dan fasos.

"Akibatnya, untuk menyerahkan saja, pengembang harus melalui prosedur yang lama dan berbelit," kata Mirna Destian Na'amin, anggota dari Fraksi Demokrat. (ARN)